

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2012. *Peranan Kantor Bea dan Cukai di Indonesia*. Jakarta: PT. Galia Indonesia.
- Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Suggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Baharuddin, 2013. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Burhanuddin, 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia.
- Chibro dan Sounir, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- C.S.T. Kansil, 1997. *Pokok-Pokok Cukai dan Materai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Cetakan I.
- Darwin, 1998. *Hukum Acara Pidana dan Praktek*. Jakarta: Djembatan.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lani, 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahakan Negar*. Jakarta: Cetakan I, Bina Aksara.
- Eddhi, Sutarto, 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan II.
- M. Karjadi, 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi Komentar*, Politea. Bogor: Cetakan I.
- Muhammad Jaya, 2009. *Pembunuhan Berbahaya itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Riz'ma.

M Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuta*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sugiono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PERS.

Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukinto dan Yudi Wibowo, 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan Cukai.

### C. WEBSITE dan JURNAL

Chairul Umam, Menelisik Politik Hukum RUU Pertembakauan, Jurnal Rechtsvinding: Media Pemberdayaan Hukum Nasional, ISSN 2089 – 9009 Rechtsvinding Online.

Egy Wahyudi, Dessy Artina, dan Widia Edorita, Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pariwisata Halal Di Kabupaten Siak, *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Volume VII, Nomor 2, Juli - Desember 2020.

Made Adi Kusuma dan Ni Ketut Supasti Darmawan, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Priyo Dharmawan, *Mencegah Praktek Cukai Rokok Ilegal di Jawa Timur Jangan Sekedar Merazia*, Buletin Balitbang Provinsi Jawa Timur, Edisi 57, Mei-Juni 2011

<https://money.kompas.com/read/2020/12/22/072603126/meski-ada-corona-penerimaan-negara-dari-cukai-rokok-justru-naik?page=all>

<https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>

<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>